

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DANA INSENTIF
DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh
PUTU RIA SEPTIANI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON REGIONAL INCENTIVE FUNDS IN INDONESIAM LOCALGOVERMENT

By:

Putu Ria Septiani

This study aims to empirically prove the effect of financial performance represented by the ratio of financial independence and the level of absorption of regional expenditure budgets on Regional Incentive Funds (DID). The research method in this study is quantitative research. The sample selection technique used was purposive sampling and obtained 422 samples of local governments in 2021. The data analysis method in this study uses multiple linear regression analysis using IBM Spss Statistic 23. The results in this study show that simultaneously the level of financial independence and the absorption rate of regional budget expenditures affect the Regional Incentive Fund. Partially, the ratio of financial independence calculated by comparing Regional Original Revenue (PAD) to Gross Regional Domestic Product (GRDP), and the level of budget absorption calculated by dividing the actual expenditure against the budget expenditure have a significant positive effect on the Regional Incentive Fund.

Keyword: Financial Performance, Financial Independence Ratio, Budget Absorption Rate, Regional Incentive Funds.

ABSTRAK

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DANA INSENTIF DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh:

Putu Ria Septiani

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio kemandirian keuangan dan tingkat serapan anggaran belanja daerah terhadap Dana Insentif Daerah (DID). Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 422 sampel pemerintah daerah pada tahun 2021. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *IBM Spss Statistic 23*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan secara simultan tingkat kemandirian keuangan dan tingkat serapan belanja anggaran daerah berpengaruh terhadap Dana Insentif Daerah. Secara parsial, rasio kemandirian keuangan yang dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat serapan anggaran yang dihitung dengan membagi realisasi belanja terhadap anggaran belanja berpengaruh positif signifikan terhadap Dana Insentif Daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, Tingkat Serapan Anggaran, Dana Insentif Daerah.

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DANA INSENTIF
DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Oleh
PUTU RIA SEPTIANI

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI

Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023

Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA KEUANGAN
TERHADAP DANA INSENTIF DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

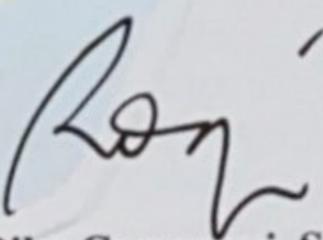
Nama Mahasiswa : **Putu Ria Septiani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1911031057**

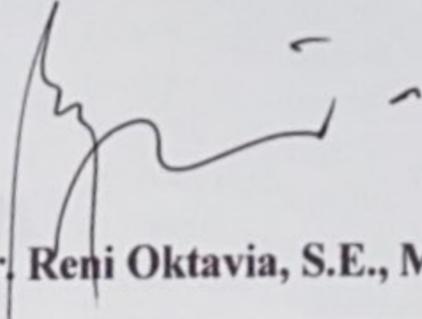
Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 195706202000122001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197510262002122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA

Penguji Kedua : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 November 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putu Ria Septiani

NPM : 1911031057

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Daerah di Indonesia" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 22 November 2023

Penulis



Putu Ria Septiani

1911031057

RIWAYAT HIDUP



Putu Ria Septiani, lahir di Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada Jum'at, 07 September 2001. Anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Wayan Parwata dan Ibu Wayan Sani. Penulis menempuh

pendidikan formal di SDN 01 Warga Indah Jaya pada

tahun 2007 – 2013, SMP Negeri 03 Banjar Agung pada tahun 2013 – 2016, SMA Negeri 1 Kota Gajah pada tahun 2017 – 2019, kemudian pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan program studi S1 Akuntansi. Selama masa perkuliahan, penulis berperan aktif dalam organisasi internal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA), UKM Hindu Unila, Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (Kopma Unila), dan BEM Universitas Lampung. Serta organisasi eksternal kampus seperti Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Selain aktif dalam organisasi, penulis juga aktif dalam program kampus merdeka seperti, Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) di Universitas Lampung tahun 2021, Program pertukaran mahasiswa Permata Sari tahun 2021, Program Riset MBKM tahun 2022, serta Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022.

PERSEMBAHAN

Om Swastyastu

Puja pangastungkara kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas anugerah dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda Wayan Parwata dan Ibunda Wayan Sani

Terima kasih atas cinta kasih tulus yang begitu besar dan tak terhingga. Terima kasih atas doa dan restu yang selalu menemani setiap prosesku. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang tak henti diberikan.

Adikku tersayang, Made Farel Wahyu Ditya

Terima kasih atas pengertian dan dukungan yang diberikan. Terima kasih telah membantu menjelaskan berbagai perasaan yang tidak mampu diucapkan.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Terima kasih atas doa dan dukungan yang mampu mengobarkan api semangat yang sering kali hampir padam. Terima kasih atas banyak bantuan saat kebingungan melanda.

Diriku Sendiri, Putu Ria Septiani

Terima kasih atas segala perjuangan dan semangatmu hingga sampai di titik ini. Terima kasih untuk tidak menyerah saat lelah dan putus asa menghantuimu.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Walaupun seandainya engkau paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini lautan dosa akan engkau seberangi”

(Bhagavad Gita, 4.36)

“Segala hal yang nyata dan kau inginkan tapi belum dapat diraih adalah fiksi, namun semua mimpi yang fiksi dan diusahakan adalah nyata”

(Fredrik Ornata)

“ Kesempatan ada karena diciptakan, bukan kebetulan. Lakukan hari ini, atau tidak sama sekali”

(Putu Ria Septiani)

SANWACANA

Om Swastyastu,

Puja pangastungkara penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Daerah di Indonesia". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik, dukungan, doa serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun

dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Wayan Parwata dan Ibu Wayan Sani. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih selalu menemani proses dan memberikan semua dukungan kepada penulis sehingga penulis berada pada titik sekarang ini. Semoga kelak penulis dapat memberikan kebahagiaan dan terus menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti.
10. Adikku, Made Farel Wahyu Ditya. Terima kasih telah menjadi orang yang berusaha mengerti dan selalu memberikan tawa di saat penulis merasa sedih dan lelah selama proses penulisan skripsi ini.
11. Sahabat dalam segala hal yang ku sebut Ghibah-in, Sinta, Syahla, dan Nurhayati. Terima kasih telah memberi dukungan, membuat hari-hari penulis selama masa perkuliahan semakin berwarna. Juga terima kasih telah membantu

segala hal yang penulis butuhkan selama pembuatan skripsi ini.

12. Teman seperjuanganku GBL, Aulia G, Sinta, Syahla, Sadam, Tiyara, Alya, Aulia R, Risa, Dina, Alkin, Nurhayati, Farhan, dan Heri. Terima kasih telah banyak membantu dan saling mengasihi selama masa perkuliahan dan selama proses skripsi ini, terima kasih atas doa, dukungan, dan banyak hal yang diberikan. Semoga hal baik selalu mengiringi kalian, dimanapun kalian berada nantinya.
13. Sahabat terbaikku, Noti, Novi, Julay dan Linda. Terima kasih karena telah mendengarkan keluh kesahku, berusaha membuatku tertawa serta terus memberikan doa baik dan dukungan untuk penulis.
14. PC KMHDI Bandar Lampung, terimakasih telah menjadi rumah, tempat belajar, pemberi warna dan pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
15. Seluruh teman-teman Akuntansi 2019, terima kasih telah kebersamai dan saling memberikan dukungan selama masa kuliah, semoga hal baik terus mengiringi kalian dimanapun kalian berada.
16. Seluruh teman-teman Bidikmisi FEB Angkatan 2019, terimakasih sudah berjuang Bersama sampai saat ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik, atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga hal baik senantiasa menanti dan mendapatkan balasan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.
18. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan di saat dirimu merasa lelah, sedih dan menyerah. Terima kasih selalu percaya dan

mampu menyemangati diri sendiri hingga dapat melewati berbagai perasaan takut dan ragu. Kamu hebat, aku hebat sudah sampai di titik ini. Semoga ke depannya selalu bahagia dan diberkati Tuhan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun agar lebih baik. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumber informasi literatur untuk penulisan karya ilmiah berikutnya.

Bandarlampung, 29 November 2023

Penulis

Putu Ria Septiani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kajian Teori.....	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	10
2.1.2 <i>Stewardship Theory</i>	11
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.1.4 Dana Insentif Daerah.....	13
2.2. Penelitian Terdahulu.....	15
2.3. Kerangka Konseptual.....	19
2.4. Hipotesis Penelitian.....	20
2.4.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Dana Insentif Daerah Pemerintah Daerah.....	20
2.4.2. Pengaruh Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah terhadap Dana Insentif Daerah Pemerintah Daerah.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.2 Populasi dan Sampel.....	23
3.2.1 Populasi.....	23
3.2.2 Sampel.....	23
3.2.3 Variabel Penelitian.....	24
3.3 Teknik Analisis Data.....	27
3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	27
3.3.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	27
3.3.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	29

3.3.3 Pengujian Hipotesis	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	31
4.3.1 Uji Normalitas.....	33
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	34
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	34
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	35
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	36
4.6 Uji Hipotesis	37
4.6.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji Simultan F).....	37
4.6.2 Uji Pengaruh Parsial (Uji T)	38
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	39
4.7 Pembahasan.....	39
4.7.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terhadap Dana Insentif Daerah (DID)	39
4.7.2 Pengaruh Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah terhadap Dana Insentif Daerah	41
BAB V PENUTUP.....	31
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	45
5.3 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Daerah Penerima DID tahun 2010-2021	4
Tabel 1.2 Perkembangan Pemerintah Provinsi Penerima DID dan Pemenuhan Kriteria Utama pada tahun 2019-2021	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistic Deskriptif	31
Tabel 4.2 Hasil Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov	33
Tabel 4.3 Hasil Uji Multi Koleniaritas	34
Tabel 4.4 Hasil Uji Auto Korelasi	35
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial	36
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	38

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual	18
Tabel 4.1 Data Outliers	32
Tabel 4.2 Hasil Uji Scatterplots	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah gambaran posisi keuangan proses akuntansi selama periode tertentu dan dimanfaatkan sebagai alat komunikasi bagi pihak yang berkepentingan (Suteja, 2018). Tidak hanya laporan keuangan perusahaan *go public* yang menjadi sorotan, namun laporan keuangan pemerintah pun menjadi perhatian publik bagi masyarakat terkait transparansi, akuntabilitas dan juga kinerja pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan sebuah entitas yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32, tercantum bentuk dan isi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disusun dan disajikan sesuai SAP, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah memberikan gambaran terkait kondisi serta kinerja keuangan pemerintah (APBN/APBD) sehingga dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal yang baik. Tujuan lain dari laporan keuangan pemerintah terdapat dalam PP RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna (masyarakat, lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya).

Dalam hal kewenangan pemerintah dalam mengatur daerahnya sendiri, dengan tuntutan mewujudkan *Good Governance*, maka pemerintah daerah tentu harus memiliki manajemen yang baik. Dalam perwujudannya, kewenangan manajemen yang dimiliki pemerintah yaitu diskresi atau *freies ermessen* dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang cepat dan tepat meskipun belum diatur dalam undang-undang atau terjadi kekosongan hukum. Kebijakan diskresi ini dikeluarkan dengan tujuan mempercepat tujuan pelayanan publik. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan diskresi namun tidak semata dilakukan dengan sewenang-wenangnya, keputusan yang diambil sesuai dengan kaidah hukum yang positif

untuk mewujudkan kepentingan umum, dan sesuai dengan Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) dan dapat dipertanggung jawabkan.

Seluruh pemerintah daerah tentu mengharapkan laporan keuangan yang baik sehingga dapat menggambarkan kinerja yang positif. Untuk menstimulasi kinerja pada pemerintah daerah, Pemerintah Pusat menerapkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana untuk membantu daerah dalam melaksanakan kewenangannya maka pemerintah pusat akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai salah satu bentuk transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. DID merupakan *reward* atas perbaikan dalam pencapaian kinerja tertentu pada tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat berbentuk penyaluran dana yang bersumber dari APBN. DID sangat diperlukan dalam memberi motivasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki.

Sejak diluncurkannya DID pada tahun 2010 yang difokuskan pada pelaksanaan Pendidikan, daerah penerima DID terus bertambah yang merepresentasikan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja yang dimiliki meskipun selama periode 2010-2014 peningkatan tersebut masih berada dibawah 100 daerah. Sedangkan, pada tahun 2015 terdapat perubahan kebijakan atas jumlah penerima dan jumlah alokasi DID yang menyebabkan jumlah daerah penerima DID meningkat pesat, (Bappenas, 2022). Berikut ini adalah perkembangan daerah penerima DID sejak diluncurkan pada tahun 2010 hingga tahun anggaran 2022:

Tabel 1.1 Perkembangan Daerah Penerima DID tahun 2010-2021

Tahun	Jumlah Daerah Penerima	Jumlah (miliar rupiah)	Total Daerah Keseluruhan	%
2010	54	1.200,5	547	9,87
2011	60	1.387,8	547	10,96

2012	66	1.387,8	547	12,06
2013	74	1.387,8	548	13,50
2014	86	1.387,8	548	18,06
2015	122	1.664,5	548	24,45
2016	243	5.000	548	49,45
2017	296	7.500	548	67,84
2018	295	8.500	548	57,11
2019	311	10.000	548	61,81
2020	416	15.000	548	75
2021	426	13.500	548	77,7
2022	383	7.000	548	69,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kementerian Keuangan, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2010 persentase daerah penerima sebesar 9,87% sedangkan pada tahun 2021 menginjak 77,7% dapat diketahui bahwa jumlah penerima DID terus bertambah dan mencapai puncak jumlah terbanyak pada tahun 2021 sekitar 426 daerah penerima. Angka tersebut tentu diharapkan terus meningkat sehingga daerah-daerah di Indonesia dapat mencapai kategori daerah mandiri.

Untuk terdaftar sebagai penerima DID, pemerintah daerah tentu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dasar hukum kriteria daerah penerima DID beberapa kali mengalami perubahan dengan menambahkan berbagai indikator penilaian sehingga berbagai daerah dapat terus bersaing dan daerah yang telah mendapatkan DID tidak berpuas diri sehingga terus meningkatkan kinerjanya. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas kriteria penerima DID berdasarkan peraturan sesuai tahun yang diteliti yaitu periode anggaran 2019-2021. Seperti yang tertuang dalam PMK RI No.141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif daerah Pasal 8 Ayat (2), bahwa terdapat beberapa kriteria utama untuk menerima

DID yaitu; opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan Perda mengenai APBD tepat waktu, pelaksanaan *e-government*, dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain kriteria utama, terdapat pula kriteria kategori kinerja yang menjadi penilain. Kemudian, PMK Nomor 141/PMK.07/2019 mengalami perubahan peraturan menjadi PMK No.167/PMK.07/2020 tentang perubahan Atas PMK No.141/PMK.07/219 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Perbedaan PMK pada tahun 2019 dan 2020 mengenai Juknis DID adalah adanya penambahan pada indikator kategori kinerja untuk penilaian DID tahun anggaran 2021, yaitu poin Sistem Informasi Keuangan Daerah pada indikator Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, poin Penurunan Angka Pengangguran pada indikator Kesejahteraan Masyarakat, indikator Pengendalian Inflasi Daerah, dan Indeks Pencegahan Korupsi. Selain penambahan kriteria penerima DID tahun anggaran 2021, terdapat beberapa indikator yang dihapuskan karena dinilai tidak efektif sebagai penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu, *Creative Financing* karena tidak memenuhi asas *fairness* untuk semua daerah, *Mandatory Spending* karena hal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi, Ketepatan Waktu Pelaporan karena juga merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, dan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) karena tidak adanya data pelaksanaan UN pada tahun 2020. Penambahan dan pengurangan indikator kategori kinerja tentu akan mempengaruhi jumlah daerah penerima DID yang mana dalam hal ini peneliti akan berfokus terhadap perkembangan Pemerintah Provinsi sebagai penerima DID. Peningkatan jumlah penerima DID dapat terjadi karena indikator yang diterapkan memungkinkan daerah kecil untuk mendapatkan DID secara merata. Berikut merupakan perkembangan Pemerintah Provinsi penerima DID sejak 2019-2020.

Tabel 1.2 Perkembangan Pemerintah Provinsi Penerima DID dan Pemenuhan Kriteria Utama pada tahun 2019-2021

Nama Provinsi	2019	2020	2021
Aceh		✓	✓
Sumatera Utara			
Sumatera Barat	✓	✓	✓

Riau	✓	✓	✓
Jambi	✓	✓	✓
Sumatera Selatan	✓	✓	
Bengkulu	✓	✓	✓
Lampung	✓	✓	✓
DKI Jakarta	✓	✓	✓
Jawa Barat	✓	✓	✓
Jawa Tengah	✓	✓	✓
DI Yogyakarta	✓	✓	✓
Jawa Timur	✓	✓	✓
Kalimantan Barat	✓		✓
Kalimantan Tengah	✓	✓	✓
Kalimantan Selatan	✓	✓	✓
Kalimantan Timur	✓	✓	✓
Kalimantan Utara		✓	✓
Sulawesi Utara	✓	✓	✓
Sulawesi Tengah	✓	✓	✓
Sulawesi Selatan	✓	✓	✓
Sulawesi Tenggara	✓	✓	✓
Sulawesi Barat	✓	✓	✓
Bali	✓	✓	✓
NTB	✓	✓	✓
NTT		✓	✓
Maluku			✓
Maluku Utara		✓	
Banten		✓	✓
Bangka Belitung	✓	✓	✓
Kepulauan Riau	✓	✓	✓
Papua Barat		✓	
Gorontalo	✓	✓	✓
Papua			✓
Total	25	29	30

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan RI, diolah.

Berdasarkan Tabel Pemerintah Provinsi penerima DID sejak 2019-2021 dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan pada tahun 2021 setelah perubahan atas kategori kinerja sebagai kriteria penerima DID, diantaranya Provinsi Jawa barat, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua yang mana pada tahun 2019 maupun 2020 tidak mendapatkan DID namun pada tahun 2021 berhasil memperoleh DID. Sedangkan untuk Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat belum mampu mendapatkan DID pada tahun anggaran 2021, padahal

kriteria utama dapat dipenuhi. Hal tersebut terjadi karena beberapa Provinsi tersebut belum mampu memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB sepanjang 2020 Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dimana pada Kuartal I mengalami pertumbuhan sebesar 4,25% (yoy), Kuartal II tercatat minus 2,77% (yoy), Kuartal III pertumbuhan ekonomi minus 2,60% (yoy) dan Kuartal IV menunjukkan penurunan paling dalam dalam tercatat 2,94% (yoy). Hal tersebut menyebabkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan belum mampu memperoleh DID pada tahun anggaran 2021. Sedangkan, pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 penerimaan PAD yang tidak tercapai sebesar Rp.241.957.271.779,72 sehingga tercatat Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) minus Rp.239.243.433.903,86. Ditambah lagi pada tahun anggaran berjalan 2021, total belanja daerah lebih besar terhadap total pendapatan sehingga tercatat SiLPA sebesar minus Rp.449.439.016.312,32. Jika dilihat dari tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan partisipatif sebesar 56,24% dimana tingkat kemandirian tersebut terus menurun sejak 2018. Selain itu, arah kebijakan Pemprov dalam pemenuhan belanja wajib belum ideal yaitu tidak terpenuhinya batas minimal pada belanja kesehatan yang hanya dianggarkan sebesar 8,66% dari batas minimal yang ditetapkan Permendagri sebesar 20% dan belanja infrastruktur yang dianggarkan 16,95% dari batas minimal anggaran dari Permendagri sebesar 25%. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Selatan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah indeks keparahan serta kedalaman tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan semakin memburuk, sehingga tidak tercapainya salah satu kriteria kinerja yang ditetapkan.

Pada Provinsi Maluku Utara, berdasarkan LKPD tahun 2019 dan 2020 diketahui realisasi PAD masing-masing sebesar Rp.433.448.363.469,52 dan Rp.447.291.483.047,01, dimana angka tersebut memiliki perbandingan yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.2.214.233.606.679,00 dan Rp.2.114.633.437.290,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan target dan realisasi Pendapatan

asli daerah masih menunjukkan disparitas terhadap pertumbuhannya. Kondisi tersebut terjadi karena strategi dan kebijakan belum optimal dan di indikasikan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Begitu pula pada Provinsi Papua Barat, diketahui bahwa realisasi PAD tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp.483.725.598.744,76 dan Rp.485.365.553.261,00 sedangkan untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat pada 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.10.855.310.290.934,00 dan Rp.8.033.764.309.935,00. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa dalam menjalankan berbagai program pemerintahannya, Provinsi Maluku Utara sangat bergantung pada Dana TKD dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, kinerja keuangan pemerintah Daerah menjadi salah satu indikator perolehan DID, yang mana kinerja keuangan termasuk kedalam kriteria kinerja pada kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperoleh DID, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya baik melalui perbaikan infrastruktur, pelayanan umum, kesehatan hingga pendidikan di daerahnya. Pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan diskresi yang dimiliki sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja yang baik untuk mendapatkan DID. Salah satu indikator *discretionary accruals* yang dilakukan adalah dengan memanipulasi tingkat pendapatan maupun tingkat belanja dalam LKPD.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Anynda, Nur Shafira 2020), diketahui bahwa tingkat kemandirian suatu daerah akan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah itu sendiri, perolehan pendapatan daerah yang optimal akan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah serta semakin pemerintah mampu menekan biaya realisasi belanja akan berimplikasi pada kinerja keuangan daerah. Penelitian kedua mengenai Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah Dalam Meningkatkan Dana Insentif Daerah Di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (Pasinringi, 2019), diketahui bahwa efektivitas dan Efisiensi mempengaruhi kinerja pemerintahan dan secara tidak langsung saat kinerja membaik maka akan

meningkatkan Dana Insentif Daerah. Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah penilaian kinerja keuangan yang baik dapat menjadi salah satu indikator Pemerintah Daerah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). Kebaruan dari penelitian ini ialah menambahkan variabel tingkat serapan anggaran belanja yang menunjang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memperoleh DID. Maka judul dari penelitian ini adalah “*Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Daerah di Indonesia*”.

1.2. Rumusan Masalah

Atas latar belakang permasalahan yang terjadi, rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini diantaranya:

1. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Dana Insentif Daerah pada Pemerintah Daerah di Indonesia?
2. Apakah Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah berpengaruh terhadap Dana Insentif Daerah pada Pemerintah Daerah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Dana Insentif Daerah pada pemerintah daerah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah terhadap penerimaan Dana Insentif Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat mendukung Teori Agensi dan dan Teori Stewardship serta penelitian terdahulu bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah menjadi indicator kinerja keuangan dalam penerimaan Dana Insentif Daerah pemerintah

daerah di Indonesia yang nantinya akan digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, memberikan wawasan baru mengenai regulasi Dana Insentif Daerah (DID) dan daerah penerima DID di Indonesia serta hal-hal yang menjadi indicator penentuan DID.
- b. Bagi Akademisi, memberikan referensi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah dan wewenangnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan terkait manajemen laba dan perbaikan kinerja pemerintah daerah yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa perbaikan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan fasilitas umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori Keagenan dari Jensen dan Mackling pada 1976 menjelaskan terdapat hubungan kontraktual antara beberapa pihak yang disebut *principal* atau pihak pemberi mandat dan *agent* yaitu pihak yang diberi mandat oleh *principal* dan memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Miriam Budiardjo (1994) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Konsep pada teori keagenan yaitu adanya kontrak yang terjadi diantara *principal* dan *agent* dimana *agent* dipekerjakan *principal* dalam menjalankan tugas kepentingan dari *principal* termasuk delegasi dalam mengambil keputusan. Konsep *principal-agent* pemerintah daerah berasumsi bahwa monopoli perilaku dibatasi oleh upaya dari masyarakat dalam memantau hasil dari kebijakan Pemda (Bravo, 2002). Dalam penelitian ini, pemerintah daerah berusaha bersaing dalam memperoleh Dana Insentif Daerah dengan cara memperbaiki laporan dan kinerja keuangan daerah yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan pelayanan umum serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori keagenan, menggambarkan untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah berwenang untuk mengelola alokasi anggaran, karena anggaran yang ada bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dengan membangun pemerintah daerah yang mandiri dan dapat mengelola belanja daerah

dengan tepat, diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah secara optimal dan pada akhirnya pemerintah daerah dapat mendapatkan Dana Insentif Daerah.

2.1.2 Stewardship Theory

Teori stewardship merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada 1997 sehubungan dengan kondisi manajemen yang terdorong untuk bekerja tidak termotivasi karena tujuan individu, namun fokus kepentingan organisasi. Pada teori ini, premis yang digunakan adalah penelitian otak dan humanisme yang arahnya untuk memacu para steward (principal) untuk bertindak sesuai keinginan manajemen dan mementingkan tujuan asosiasi untuk mencapai target (Riyaldi & Yulianto, 2014). Teori tata kelola (stewardship theory) dalam konteks akuntansi publik mengacu pada konsep bahwa pemerintah atau badan pemerintah bertindak sebagai "steward" atau pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya publik dan dana yang dipercayakan kepada mereka oleh masyarakat. Teori ini menekankan bahwa entitas pemerintah atau lembaga publik harus menjalankan peran mereka dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan publik.

Dalam praktiknya, tata kelola yang baik dalam akuntansi publik melibatkan penyusunan anggaran yang baik, pelaporan keuangan yang jelas, audit independen, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sebaik mungkin. Prinsip-prinsip ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik dan memastikan bahwa pemerintah atau badan pemerintah bertindak sebagai pengelola yang baik atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemda merupakan tingkat pencapaian hasil kerja keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja dalam LKPD dengan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui kebijakan dan perundang-undangan dalam satu tahun periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan tingkat capaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan program kebijakan dalam

merealisasikan tujuan, sasaran dan visi misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013:25). Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa indikator kinerja adalah ukuran pencapaian dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah terencana seperti *input*, *output*, dan hasil dari keuangan daerah.

Bentuk kinerja pemerintah daerah dilaporkan pada laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa perhitungan APBD. Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan menganalisis LK terhadap APBD yang telah ditetapkan dan terlaksana. Rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur akuntabilitas pemda, dimana terdapat beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas dan pertumbuhan (Abdul Halim, 2002). Namun, berdasarkan PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah mencakup kemandirian daerah dan efisiensi pengelolaan belanja daerah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahnya sendiri, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah. Menurut PMK No.141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) daerah itu sendiri. Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan sendiri tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan eksternal lainnya. Rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa memiliki ketergantungan yang tinggi pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, rasio yang rendah menandakan ketergantungan yang tinggi pada

sumber daya eksternal, seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat. Informasi mengenai rasio ini penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kebijakan ekonomi dan keuangan yang lebih efektif. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengevaluasi efisiensi dan keberhasilan kebijakan ekonomi daerah.

b. **Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah**

Tingkat Serapan anggaran belanja daerah adalah ukuran yang mengukur sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan atau dianggarkan oleh pemerintah daerah telah digunakan atau dieksekusi dalam periode tertentu. Tingkat Serapan anggaran ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek-proyek dan program-program yang telah direncanakan dalam anggaran. Selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget variances*). Semakin kecil varian anggaran (*budget variances*), maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan.

Menurut Abdullah & Nazry (2014) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah, et al. 2015)

2.1.4 Dana Insentif Daerah

Berdasarkan PMK No.141/PMK.07/20219 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, dimana DID merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal dari APBN sebagai bentuk *reward* atau penghargaan atas capaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum

pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah tertentu yang memenuhi kriteria tertentu sebagai. Untuk memperoleh DID, terdapat kriteria utama dan kriteria kinerja yang harus dipenuhi.

Kriteria utama dalam perhitungan alokasi DID, adalah sebagai berikut:

- 1) Opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 2) Penetapan peraturan pemerintah daerah mengenai APBD tepat waktu.
- 3) Pelaksanaan e-government
- 4) Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain Kriteria utama di atas, terdapat beberapa kriteria kinerja menurut PMK No.167/PMK. 07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 141/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Kategori pelayanan dasar publik di bidang pendidikan
- 3) Kategori pelayanan dasar publik di bidang kesehatan
- 4) Kategori pelayanan dasar publik di bidang infrastruktur
- 5) Kategori pelayanan umum pemerintahan
- 6) Kategori kesejahteraan masyarakat
- 7) Kategori peningkatan investasi
- 8) Kategori peningkatan ekspor
- 9) Kategori pengelolaan sampah
- 10) Kategori Pengendalian inflasi
- 11) Kategori Pencegahan Korupsi

Setelah dilakukannya penilaian dengan kategori kinerja selama dua tahun terakhir dan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria maka DID dapat disalurkan. Penyaluran DID dilakukan secara bertahap sesuai PMK yang berlaku dengan ketentuan:

- Tahap I disalurkan 50% dari pagu alokasi minimal bulan Februari dan maksimal bulan Juni.
- Tahap II disalurkan 50% dari pagu alokasi minimal bulan Juli setelah DJPK menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I paling sedikit 70% dari dana yang diterima di RKUD.

Menurut PMK No.167/PMK.07/2019 Pasal 20 ayat (1), dalam penggunaannya, DID di prioritaskan untuk:

- a) Bidang pendidikan dan Kesehatan termasuk pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- b) Pemulihan dan pemberdayaan UMKM, industry kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Anynda, Nur Shafira (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	X= RKKD, Efisiensi PAD, dan pengelolaan Belanja Daerah Y= Kinerja Keuangan	Analisis regresi linier berganda	(1)Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dalam hal ini adanya pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat suatu kemandirian suatu daerah Mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut. (2) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. (3) Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh

				positif terhadap kinerja keuangan daerah.
2	Ani, Niluh dan Dwirandra, A.A (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan Kabupaten dan Kota.	X1=Rasio Kemandirian X2= Rasio Efektivitas X3=Rasio Efisiensi X4= Rasio Pertumbuhan pendapatan Y= Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan	Regresi Linier Berganda	kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
3	Astiti, Desak Nyoman dan Himba, Ni Putu (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada	X1= Belanja Rutin X2= Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

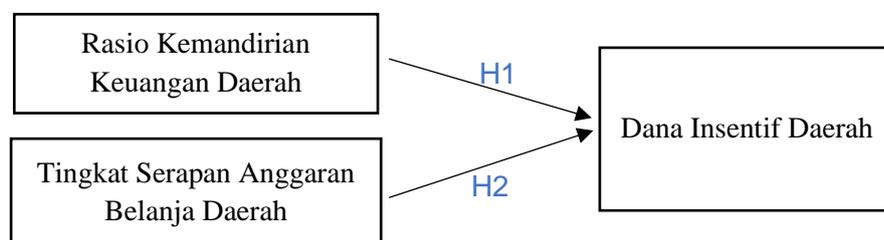
	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y= Kinerja keuangan pemerintah daerah		<p>Pengalokasian belanja rutin yang tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun dalam hal ini pemerintah lebih banyak mengalokasikan belanja daerah yaitu pada belanja pegawai sebagai salah satu jenis belanja rutin sehingga tidak tepat sasaran. Belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
4	M. Fadel Pasinringi (2019). Efektifitas Atas Pengelolaan Belanja Daerah Dalam Peningkatan Dana Insentif Daerah Studi Kasus Di	X= Efektivitas Belanja Daerah Y=Dana Insentif Daerah	Kualitatif dengan dokumentasi dan wawancara kepada pihak terkait	Hasil yang diperoleh adalah pengelolaan belanja di daerah yang diwakili oleh belanja modal memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan DID.

	Kabupaten Barru Prov. Sulawesi Selatan			
5	Fitri Umi Hanik, Tutik Dwi Karyanti (2017), Analisis Rasio Keuangan Pemda Sebagai Penilaian Kinerja Pemda Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Kabupaten Semarang.	X= Rasio Keuangan Y= Kinerja Pemerintah Daerah	Kulitatif dengan wawancara dan kuantitatif dengan pengukuran rasio kinerja	Rasio keuangan mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Semarang.
6	Nia Amelija (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemda Di Daerah Prov. Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Kemandirian Keuangan, Modal Kerja Dan Surplus (Defisit).	X1= Rasio Likuiditas X2= Rasio Kemandirian X3= Rasio Belanja Modal Y= Kinerja keuangan	Uji Beda dan Analisis Deskriptif	Rasio likuiditas Pemprov Sumatera Utara dikategorikan cukup baik terhadap kinerja keuangan, rasio Kemandirian dikategorikan sangat rendah sekali terhadap kinerja keuangan. Dan rasio modal kerja di nilai cukup baik terhadap peningkatan kinerja.
7	Eka Oktariyani (2020), Pengaruh Penerapan <i>Discretionary Accrual</i> , Kinerja Kesehatan Fiskal, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Insentif Pemerintah Daerah Se-Indonesia.	X1= <i>Discretionary Accrual</i> X2= Kinerja Kesehatan Fiskal X3= Pengelolaan	Data Kuantitatif dengan Uji Regresi Linier Berganda	<i>Discretionary Accrual</i> yang diwakili oleh <i>Unexpexted Depresiasi Asset</i> tidak berpengaruh terhadap DID, sedangkan Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah

		Keuangan Daerah Y= Dana Insentif Daerah		berpengaruh positif terhadap DID.
8	Ery Jajat Firdaus (2020) Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendapatkan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur	X1 = Rasio Efektivitas PAD X2 = Derajat Desentralisasi X3= Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif dengan teknik analisis data yaitu reduksi data	Rasio Efektifitas PAD, Derajat Desentralisasi, dan Rasio Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelusuran teori maupun penelusuran penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka konseptual yang mencerminkan alur logika dalam penelitian ini adalah:



Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat dijabarkan bahwa peneliti hendak meneliti adanya pengaruh yang dihasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Dana Insentif Daerah. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diwakili oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah. Dengan rasio kemandirian keuangan yang baik, maka akan mempengaruhi besaran Dana Insentif Daerah yang diperoleh oleh suatu daerah. Begitu pula dengan tingkat serapan anggaran belanja, keberhasilan pendistribusian dan realisasi anggaran belanja akan mempengaruhi penyaluran Dana Insentif Daerah.

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka hipotesis yang dimunculkan adalah:

2.4.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Dana Insentif Daerah pada Pemerintah Daerah di Indonesia.

Hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi. Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Joeniarso, 1992). Urgensi dilaksanakan asas desentralisasi adalah sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya agar pemberian perhatian serta pelayanan kepada masyarakat dapat lebih terfokuskan. Hal ini tentu sejalan dengan Teori Keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *agent* yang mana dalam hal ini adalah pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh *prinsipal* yaitu Masyarakat.

Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio ini menunjukkan peran mereka dalam bidang pembangunan daerah seperti peran masyarakat dalam membayar retribusi serta pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah tentu harus memiliki sumber keuangan yang baik sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pekayanan pada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen yang penting dalam laporan keuangan yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah, hal ini tentu sesuai dengan *Stewardship theory* dimana pemerintah daerah berusaha memaksimalkan kinerjanya untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga nantinya pemerintah daerah mampu bersaing dalam mendapatkan reward pemerintah pusat yaitu Dana Insentif Daerah.

Rasio kemandirian yang tinggi akan mendorong kinerja keuangan daerah yang baik pula, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2010), tentang Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang

Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa kemandirian daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa factor seperti factor kesejahteraan, lingkungan dan finansial. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Adi (2006) tentang Kemandirian Daerah Menjelaskan Tingkat Kemandirian Melalui Total Pendapatan, sehingga menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Anynda, Nur Shafira (2020) tentang Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, bahwa Rasio Kemandirian Daerah mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemandirian suatu daerah tentu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi positif dan mampu meningkatkan investasi di daerah serta peningkatan kinerja keuangan yang mana hal-hal positif tersebut memberikan peluang bagi suatu daerah untuk mendapatkan rewards dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah. Oleh sebab itu, hipotesis yang dapat ditarik yaitu:

H1 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah.

2.4.2. Pengaruh Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah terhadap Dana Insentif Daerah Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan *Stewardship Theory* yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan pribadi namun sasaran utama ditujukan pada kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Dalam teori ini, akan berusaha melindungi dan memaksimalkan kinerja organisasi sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur proses reformulasi Dana Insentif Daerah yang merupakan salah satu cara memotivasi pemerintah daerah agar capaian kinerja yang didapatkan setiap daerah semakin baik, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait akuntabilitas yang dijalankan pemerintah daerah selama diberikan kepercayaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini tentu sejalan dengan Teori Keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *agent* yang mana dalam hal ini adalah pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh *prncipal* yaitu Masyarakat. Setiap daerah yang

mempunyai kinerja baik dalam mengelola keuangan maka semakin tinggi dana insentif daerah yang didapatkan. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan layanan dasar publik, pembangunan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah Pusat dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah memberikan *reward* berupa Dana Insentif Daerah sebagai sebuah penghargaan apabila pemerintah daerah mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengeluarkan pendapatan daerah dalam bentuk belanja. Pengelolaan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah tentu tidak lebih besar dibandingkan total pendapatan yang diterima pemerintah daerah (Nanik, 2012). Pengelolaan belanja daerah yang baik dan tepat tentu akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat Serapan yang tinggi dapat dianggap sebagai tanda bahwa pemerintah daerah telah efektif menggunakan anggaran yang telah dialokasikan, dan sebagai hasilnya, mereka dapat memenuhi syarat untuk menerima insentif tambahan. Sebaliknya, Tingkat Serapan yang rendah mungkin mengakibatkan pemerintah daerah menerima dana insentif yang lebih sedikit atau bahkan tidak menerima insentif sama sekali. Dengan peningkatan kinerja keuangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini dapat ditarik hipotesis dimana Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah dapat memiliki pengaruh positif terhadap dana insentif daerah, terutama dalam konteks negara yang menerapkan sistem insentif fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

H2 = Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan data konkrit, data berupa angka dan akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan, (Sugiyono, 2015). Sedangkan, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan informasi atau data yang telah ada sebelumnya, kemudian dikumpulkan peneliti untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, laporan pemerintah, data dari artikel dan lain sebagainya (Sukiati, 2016). Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) di Indonesia periode 2019-2021.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia. Provinsi dan Kabupaten/kota yang ada di Indonesia per tahun 2021 berjumlah 514 daerah.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan perwakilan populasi yang memiliki karakteristik dan memenuhi kriteria sesuai gejala yang amati dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana penetapan sampel dengan memilih sampel sesuai dengan kriteria dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Berikut merupakan kriteria sampel, yaitu:

1. Pemerintah daerah yang ada di Indonesia tahun 2021.
2. Pemerintah daerah dengan LKPD periode 2019-2021 terdapat di BPK.
3. Pemerintah daerah yang mendapatkan Dana Insentif Daerah pada 2021.

Tabel 3.1 Sample Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia tahun 2021	514
2	Pemerintah Daerah yang tidak mendapatkan DID pada tahun anggaran 2021	92
Sampel Penelitian		422

3.2.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan atribut atau sifat objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari, diamati dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel bebas (X), Variabel terikat (Y). Berikut merupakan variabel yang digunakan pada penelitian ini:

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan kegiatan pemerintah daerahnya sendiri, pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendukung pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai kebijakan, program, dan layanan publiknya tanpa harus terlalu bergantung pada sumber pendapatan eksternal lainnya, seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri.

Salah satu rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah Rasio Kemandirian Keuangan (Own Source Revenue Ratio). Rasio ini mengukur sejauh mana pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan lokal atau internal, seperti pajak daerah, retribusi, dan lain sebagainya terhadap Produk Domestic Regional Bruto. Berdasarkan PMK No.

141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana insentif Daerah, RKKD dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{PDRB} \times 100\%$$

B. Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah

Tingkat Serapan belanja daerah adalah sebuah ukuran yang digunakan dalam konteks keuangan pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana anggaran belanja yang telah dialokasikan atau dianggarkan telah digunakan atau dieksekusi. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek-proyek dan program-program yang telah direncanakan.

Menurut Abdullah & Nazry (2014) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah, et al. 2015).

$$\text{Tingkat Serapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

C. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal dari APBN sebagai bentuk *reward* atau penghargaan atas capaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah tertentu yang memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.167/PMK.07/2020 tentang perubahan

Atas PMK No.141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, pengalokasian DID pada tahun 2021 diberikan berdasarkan kinerja dua tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan menggunakan formula dan indicator kinerja yang sama.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PMK No.167/PMK.07/2020 tentang perubahan Atas PMK No.141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, pengalokasian DID pada tahun 2021, capaian kinerja tahun terakhir dinilai berdasarkan beberapa kategori penilaian, yaitu:

- a. Kategori kemandirian daerah
- b. Kategori kualitas belanja modal untuk Pendidikan
- c. Kategori kualitas belanja modal untuk Kesehatan
- d. Kelompok kategori pelayanan dasar public bidang pendidikan
- e. Kelompok kategori pelayanan dasar public bidang kesehatan
- f. Kelompok kategori pelayanan dasar public bidang infrastruktur
- g. Kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah
- h. Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Kategori kesejahteraan Masyarakat
- j. Kelompok kategori peningkatan investasi
- k. Kelompok kategori peningkatan ekspor, dan
- l. Kelompok Kategori Pencegahan Korupsi

Berdasarkan PMK No.167/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK No.141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Alokasi DID dihitung berdasarkan penilaian peningkatan kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir. Penilaian peningkatan kinerja merupakan selisih nilai kinerja selama dua tahun. Nilai Kinerja masing-masing kategori merupakan penjumlahan antara selisih kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir, yang mana, dalam penelitian ini perhitungan nilai kinerja akan digunakan untuk menghitung nilai kinerja kemandirian keuangan daerah. Penilaian peningkatan kinerja dapat dihitung dengan rumus:

$$\boxed{\text{Nilai Kinerja} = \text{Selisih kinerja 2 tahun} + \text{Kinerja tahun terakhir}}$$

Kemudian diperingkatkan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:

Nilai Kinerja	Peringkat
91 – 100	Amat Baik (A)
76 – 90	Baik (B)
61 – 75	Cukup (C)
51 – 60	Sedang (D)
0 - 50	Kurang (E)

Dalam Penelitian ini, data Dana Insentif Daerah yang digunakan berupa angka nominal dalam rupiah yang diperoleh melalui lampiran PMK No.141/PMK.07/2020 tentang perubahan Atas PMK No.141/PMK.07/219 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, pengalokasian DID pada tahun 2021.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah bentuk dari model dalam mengelola berbagai data yang akan digunakan. Dalam penelitian pemilihan metode yang tepat sangat penting guna memperoleh hasil yang akurat dan relevan. Berikut merupakan teknik uji data yang ditetapkan dalam penelitian ini:

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan model yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu yang telah ada baik berupa kondisi, pendapat, dan perkembangan proses. Model ini dapat menggambarkan secara akurat berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Model ini digunakan untuk menjelaskan berbagai variabel penelitian guna mengetahui memberikan gambaran perkembangan responden secara umum dan mendeskripsikan berbagai variabel penelitian guna memahami distribusi frekuensi variabel yang menggambarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai tengah dari setiap variabel yang akan diteliti.

3.3.2 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan yang penting dilakukan terlebih dulu sebelum melakukan uji regresi guna menetapkan model penelitian yang tepat bagi penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai objek telitinya. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, diantaranya:

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan terdapat indikasi dan dapat terdistribusi secara normal sebelum dilakukannya uji regresi. Jika setelah dilakukan uji normalitas ternyata terdapat pelanggaran asumsi klasik maka variabel yang digunakan kemungkinan tidak dapat digunakan untuk sampel dalam jumlah kecil. Terdapat dua model yang bisa digunakan untuk mendeteksi normalitas data, diantaranya menggunakan grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018). Jika hendak melihat data terdistribusi secara normal, maka dapat dilihat pada sebaran data pada garis diagonal. Data yang terdistribusi normal memiliki pola data yang menyebar disekitar garis diagonal dan tidak membentuk pola berulang. Sebaliknya, jika data tersebar menjauh dari garis diagonal dan memiliki pola berulang maka data tersebut dapat dikatakan tidak terdistribusi secara normal.

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian digunakan untuk mengetahui adanya korelasi ataupun tidak pada regresi antar variabel independennya. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi dan gejala multikolinearitas antar variabel bebasnya (Ghozali, 2018). Dalam mendiagnosa gejala multikolinearitas, dapat dilakukan uji *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dapat dikatakan baik jika model regresi memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat dikatakan model tersebut tidak mengandung gejala multikolinearitas.

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Variance residual* antar pengamatan. Jika nilai varian dinyatakan tetap, maka dapat dinyatakan Homoskedastisitas atau terhindar dari gejala Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2023), apabila nilai Sig. $< 0,05$ maka model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila nilai Sig. $> 0,05$ maka model regresi dinyatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

3.3.2.4 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui dalam penelitian apakah terdapat keterkaitan antar pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya dalam sebuah model regresi dapat menggunakan uji autokorelasi. Jika dinyatakan terdapat korelasi dalam model regresi, maka bisa dinyatakan bahwa terdapat masalah autokorelasi yang muncul karena observasi yang dilakukan secara berurutan dan sepanjang waktu

memiliki kaitan satu sama lain. Permasalahan ini juga dapat timbul lantaran residual atau ketidakbebasan kesalahan pengganggu antar observasi (Ghozali, 2018). Menurut Suyanto (2016), salah satu metode untuk menentukan keberadaan gejala autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW), dimana kriterianya adalah apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 < DW < 2$), maka model regresi linier dinyatakan tidak mengalami masalah autokorelasi. Sedangkan apabila nilai DW berada dibawah -2 maka dinyatakan terjadinya autokorelasi positif, dan apabila nilai DW berada diatas 2 maka model regresi mengalami autokorelasi negative.

3.3.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui arah variabel dan besaran pengaruh yang diberikan oleh variable independent terhadap variable dependent (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, kebijakan diskresi akrual sebagai variabel independent, kinerja keuangan sebagai variabel intervening dan Dana Insentif Daerah sebagai variabel dependen. Regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan Regresi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Dana Insentif Daerah
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- X1 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- X2 : Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah
- e : *Error Term*

3.3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui ukuran kemampuan model dalam menerangkan variabel bebasnya (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan 0 dan 1. Jika semakin dekat dengan 0, maka pengaruh semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai koefisien mendekati 1, maka pengaruhnya semakin besar. Jika R^2 bernilai kecil, maka menggambarkan bahwa

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kecil dan begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

3.3.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi

Uji F bertujuan untuk melihat besaran pengaruh yang diberikan variabel Independen secara bersamaan. Jika nilai Sig F $<0,05$, maka dinyatakan bahwa model tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel independen karena uji F dilakukan untuk memperlihatkan model yang memberikan pengaruh secara bersamaan pada variabel independen. Kriteria uji hipotesis ditetapkan dengan signifikansi $F < 0,005$ sehingga hipotesis dinyatakan diterima secara simultan dan signifikan (Ghozali, 2018).

3.3.3.3 Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Parsial

Uji t statistik dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh yang dihasilkan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria uji t ditetapkan dengan dasar probabilitas. Jika nilai signifikansi $<0,05$, maka dapat dinyatakan signifikan. Sementara jika hasilnya signifikansinya $>0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa dampak atau pengaruh yang diberikan tidak signifikan (Ghozali, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang diatur dalam PMK 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK.141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, dengan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Variable Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), yang diperoleh dari Penilaian Kinerja yang mana dihitung dengan membagi PAD terhadap PDRB tahun 2018-2020 yang telah diatur dalam PMK 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK.141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, berpengaruh positif signifikan terhadap Dana Insentif Daerah (DID). Penelitian ini mendukung H_1 yang menyatakan bahwa RKKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan DID, yang mana dengan meningkatnya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah artinya daerah tersebut mampu menghasilkan, mengelola pendapatan daerah secara mandiri dan meningkatkan kinerja keuangan, serta memiliki ketergantungan keuangan yang rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan daerahnya. Atas kinerja keuangan yang baik tersebut, pemerintah pusat akan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dengan pemberian Dana Insentif Daerah.
2. Variablel Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah, yang dihitung dengan membaagi antara anggaran belanja daerah terhadap realisasi belanja daerah tahun 2020, berpengaruh terhadap Dana Insentif Daerah (DID). Penelitian ini mendukung H_2 yang diajukan yang menyatakan bahwa Tingkat Serapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan DID. Tingkat Serapan Anggaran Belanja yang tinggi dan mendekati 100% menandakan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran dan melakukan

pemenuhan berbagai program-program untuk operasional dan kesejahteraan Masyarakat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Tidak adanya data jumlah penyaluran Dana Insentif Daerah berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam PMK 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK.141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, sehingga angka Dana Insentif Daerah yang digunakan merupakan dana yang diberikan berdasarkan seluruh kategori kinerja, tidak hanya berdasarkan kategori kinerja keuangan.
2. Tidak dijelaskan secara rinci dalam PMK 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK.141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mengenai kriteria atau rasio minimum suatu daerah dapat dikatakan mandiri dan diperhitungkan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah.
3. Regulasi terkait indikator dan penggunaan Dana Insentif Daerah yang sering mengalami perubahan karena berbagai alasan seperti perubahan kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi besaran penyaluran Dana Insentif Daerah, sehingga indikator dan besaran pada tahun yang berbeda tidak dapat disamaratakan.
4. Penelitian terdahulu yang membahas pengaruh kinerja keuangan terhadap DID yang masih sangat minim. Selain itu, perhitungan kinerja keuangan salah satunya variable kemandirian yang memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan yang diterapkan.

5.3 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang dialami pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variable kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga cakupan variable penelitian lebih luas.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator penilaian Dana Insentif Daerah selain kinerja keuangan sehingga dapat menjelaskan indikator atau variable manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penerimaan Dana Insentif Daerah.

Daftar Pustaka

- Arcas, M.J. dan C. Martí. 2016. *Financial performance adjustment in English local governments*. *Australian Accounting Review* 26(2): 141–152. <https://doi.org/10.1111/auar.12094>.
- Ayem, S., & Yuliana, D. 2019. *Pengaruh Independensi Auditor, Kualitas Audit, Manajemen Laba, dan Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI)*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 16(1).
- Abdullah, S. & Ramadhaniatun Nazry. 2014. *Varian Anggaran Pendapatan dan Varian Belanja Daerah: Sebuah Pengantar*. Laman sumber: http://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varian-anggaran-pendapatandaerah/?relatedposts_exclude=2784.
- Abdullah, Syukriy dkk. 2015. *Serapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah: Studi Empiris dari Kota Banda Aceh*. *Jurnal Akuntansi Publik*. Sumber: https://www.researchgate.net/profile/Syukriy-Abdullah-2/publication/336358140_Serapan-Anggaran-Pada-Organisasi-Perangkat-Daerah-Bukti-Empiris-dari-Kota-Banda-Aceh.pdf.
- Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 70 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Bravo, A. B. (2002). *Local Government Behavior and Principal-agent Theory*. Academia Militar CIEF (Technical University of Lisbon), 1-13.
- Bappenas. (2022). *Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan*. Working Pappers Vol. V No.1. Juli 2022.
- Chan, J. L. (2008). *Accrual Accounting: Concepts, Standard and Implementation*. Roma: National School for Public Administration Republic of Italy.
- DJPK Kementerian Keuangan RI. (2018). *Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2019*. Lampiran DID Rotaded.
- DJPK Kementerian Keuangan RI. (2019). *Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2020*. Lampiran DID Rotaded.
- DJPK Kementerian Keuangan RI. (2020). *Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2021*. Lampiran DID Rotaded.

- Donatella, P. 2019. *Is political competition a driver of financial performance adjustments? An examination of Swedish municipalities*. *Public Money and Management* 40(2): 122-130. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1667684>.
- Donatella, P. dan T. Tagesson. 2020. *CFO characteristics and opportunistic accounting choice in public sector organizations*. *Journal of Management and Governance* 25(2): 509- 534. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09521-1>.
- Farida, Ai Siti dan Raden Faisal. 2019. *Analisis Laporan Pemerintah daerah Kabupaten Subang*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara
- Firdaus, Jajat Ery. 2020. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendapatkan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampangan, Jawa Timur. Jurnal: IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/14534/1/ery-jajat-firdaus_analisis-kemandirian-keuangan-daerah-dalam-mendapatkan-dana-insentif-daerah.pdf
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & H.Meckling, W. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal Of Financial Economics*, 305-360.
- Joeniarto R. (1992). *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Mohammad (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Nanik, W. 20012. *Analisa Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Skripsi.UIN Maliki. Malang

- Ningsih, A. T. 2010. *Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, F. dan A. Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Jurnal. Universitas Diponegoro 1(1): 1-13
- Nurhazana, Synta. 2021. *Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah Dalam Meningkatkan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bengkalis*. Jurnal IAKP: Politeknik Negeri Bengkalis
- Nurochman, A., & Solikhah, B. (2015). *Accounting Analysis Journal*. 4(4), 1–9.
- Oppier, Hermi. (2013). *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal Benchmark Volume 2. November 2013.
- Oktariyani, Eka. (2020). *Pengaruh Penerapan Discretionary Accrual, Kinerja Kesehatan Fiskal, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Insentif Pemerintah Daerah Se-Indonesia*. Jurnal. Universitas Lampung.
- Pasinringi, M. Fadel (2019). *Efektifitas Atas Pengelolaan Belanja Daerah Dalam Peningkatan Dana Insentif Daerah Studi Kasus Di Kabupaten Barru Prov. Sulawesi Selatan*. Jurnal Akuntansi & Akmenika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.141/PMK.07 /2019 tentang *Pengelolaan Dana Insentif Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.167/PMK.07/2020 tentang *perubahan Atas PMK No.141/PMK.07/219 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rohman, A. & Rochmawaty D. (2018). *Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, diketahui bahwa*

kebijakan discretionary accruals mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sriwijaya.
<https://www.neliti.com/id/publications/276915/analisis-pengaruh-laporan-hasil-pemeriksaan-diskresi-akrual-dan-tingkatan-akrual>.

Riyaldi, S., & Yulianto, A. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Nonperforming Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.* Accounting. Analysis Journal, 3(4).

Saputra, Erisandi, dkk. 2018. *Analisis Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.* Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/<https://media.neliti.com/media/publications/393202-none-9f0f5baf.pdf>.

Stigler, George J. (1971). *The Theory of Economic Regulation.* *Bell Journal of Economics and Management Science* 3. Chicago: Rand Corporation.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: ALFABETA.

Sulistiawan, dkk. 2011. *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.
<http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/37439>

Suteja, I. G. N. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Altman ZScore Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk.* *Jurnal Moneter.* Vol. V no. 1. April 2018.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Utomo, D. P. (2011). *Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok timur Tahun Anggaran 2007-2009.* *Jurnal Educatio,* 4, 57-80.